

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Komodifikasi**

Untuk dapat memahami konsep komodifikasi, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan nilai guna dan nilai tukar dahulu. Menurut Adam Smith, nilai guna dan nilai tukar merupakan nilai yang dapat membedakan suatu produk. Nilai guna berasal dari kepuasan manusia atas keinginan atau kebutuhan tertentu, sedangkan nilai tukar didasarkan pada apa yang dapat dihasilkan produk dalam pertukaran. Komoditas adalah bentuk dari produk saat produksinya diatur melalui proses pertukaran tersebut (Mosco, 1996: 140-141). Sebagai contohnya nanti masyarakat pulau santen dengan adanya komodifikasi modal sosial ini masyarakat bisa mengembangkan pulau syariah ini yang sebagaimana nanti mampu meningkatkan kunjungan wisata dan memiliki daya saing sebagai destinasi wisata halal.

##### **2.1.2 Modal Sosial dalam Pariwisata**

Modal sosial dalam pariwisata bahwasannya merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung sebuah pariwisata. Dalam sebuah pariwisata tentunya banyak sekali elemen yang berperan didalamnya mulai dari masyarakat maupun pemerintah, tentunya juga dalam

pariwisata ini terdapat sebuah kepercayaan, norma dan jaringan yang nantinya digunakan dalam mengembangkan sebuah objek pariwisata.

Uphoff (1999: 78) menyatakan bahwa modal sosial adalah akumulasi aset berbagai jenis kognitif sosial, psikologis, budaya, institusi, dan perilaku yang saling menguntungkan. Modal sosial menggambarkan perilaku yang produktif bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Hal lain, modal sosial juga mengacu pada potensi kelompok atau antar kelompok dengan memunculkan sumberdaya yang produktif. Oleh karenanya, terminalogi istilah modal bukan saja mengacu pada modal manusia, modal alam, modal ekonomi, dan modal fisik tetapi juga modal sosial sebagai kekuatan dalam pembangunan.

Istilah modal sosial pertama kali dikemukakan pada tahun 1916 oleh Linda Hanifan (Aghajanian, 2012: 54) yang menyatakan bahwa, modal sosial merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti persekutuan, simpati, hubungan sosial antar individu, hubungan sosial dalam keluarga, dan kehidupan bermasyarakat yang membentuk suatu unit sosial. Makna modal sosial ini mengacu pada kekuatan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat baik individu maupun kelompok. Kekuatan hubungan sosial tercermin dari perilaku baik, rasa bersahabat, saling simpati, hubungan baik dan kerjasama yang erat di antara individu dalam keluarga untuk membentuk suatu kelompok sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Kushandajani, 2006: 19).

Pengertian modal sosial ditelusuri lebih luas oleh sosiolog Pierre Bourdieu (Ottebjer, 2005) pada tahun 1986 dengan memberikan

pengertian modal sosial sebagai agregat sumber daya potensial yang terkait dalam suatu jaringan ataupun hubungan timbal balik yang saling memberikan penguatan di dalam suatu kelembagaan. Penekanan modal sosial terletak pada keseimbangan jaringan oleh adanya hubungan, kesadaran melakukan hubungan timbal balik, dan pengakuan dari individu anggota dalam jaringan tersebut (Magliola, 2005: 22). Dipertegas oleh Kushandajani (2006: 65) bahwa, keseluruhan sumber daya baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan dalam hubungan kelembagaan serta didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui dipandang sebagai modal sosial dalam masyarakat. Dua komponen penting modal sosial yaitu (1) adanya sumber daya yang dihubungkan dengan anggota kelompok dan jaringan sosial dan (2) adanya kesadaran dan pengakuan yang saling bersama diantara anggota kelompok dan jaringan sosial (Siisiäinen, 2000: 22).

Konsep modal sosial ditelaah lebih lanjut oleh Coleman (1990) yang memberikan pengertian modal sosial atas dasar fungsinya. Modal sosial bukan entitas tunggal tetapi berbagai entitas yang berbeda dengan dua unsur yang sama. Pengertian modal sosial tersebut menyiratkan bahwa, kedua unsur yang sama tersebut akan bergabung dalam satu struktur sosial guna memfasilitasi aktivitas

Putnam (dalam Hasbullah 2006: 53) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya, Modal sosial dapat meningkatkan

kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, modal sosial mempunyai pengaruh yang besar sebab beberapa dimensi pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain, kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan.

Hal ini terbangun oleh adanya rasa saling mempercayai, kohesifitas, tindakan proaktif, dan hubungan internal-eksternal dalam membangun jaringan sosial didukung oleh semangat kebajikan untuk saling menguntungkan sebagai refleksi kekuatan masyarakat. Situasi ini akan memperbesar kemungkinan percepatan perkembangan individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut. Bagaimanapun juga kualitas individu akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat itu berarti pembangunan manusia paralel dengan pembangunan sosial (Haridison, 2013: 37).

### **2.1.3 Modal Sosial dan Pembangunan Sosial**

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Dengan saling percaya toleransi, dan kerjasama mereka dapat membangun jaringan baik di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Pada masyarakat tradisional, diketahui

memiliki asosiasi-asosiasi informal yang umumnya kuat dan memiliki nilai-nilai, norma, dan etika kolektif sebagai sebuah komunitas yang saling berhubungan.

Hal ini merupakan modal sosial yang dapat mendorong munculnya organisasi-organisasi modern dengan prinsip keterbukaan, dan jaringan-jaringan informal dalam masyarakat yang secara mandiri dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama dalam kerangka pembangunan masyarakat. Berkembangnya modal sosial di tengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, dan merangsang tumbuhnya empati dan simpati terhadap kelompok masyarakat di luar kelompoknya. Hasbullah (2006) memaparkan mengenai jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial akan memudahkan saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Hasilnya adalah lahirnya masyarakat peduli pada berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan, masyarakat yang saling memberi perhatian dan saling percaya. Situasi yang mendorong kehidupan bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan tenteram (Haridison, 2013: 38).

## 2.1.4 Modal Sosial

### 1. Coleman

Coleman mampu menunjukkan bahwa modal sosial tidak terbatas pada mereka yang kuat, namun juga mencakup manfaat riil bagi orang miskin dan komunitas yang terpinggirkan. Modal sosial menurut Coleman, mempresentasikan sumber daya karena hal ini melibatkan harapan akan resiprositas dan melampaui individu manapun sehingga melibatkan jaringan yang lebih luas yang hubungan-hubungannya diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama.

Ingat bahwa sosiologi pilihan rasional yang dikemukakan Coleman berasumsi bahwa aktor individu biasanya mengejar kepentingan diri mereka sendiri, jika mereka memilih bekerja sama itu semua karena hal tersebut menjadi kepentingannya. Dalam teori pilihan rasional, kerjasama adalah perkecualian dari aturan longgar tentang aktor yang menyendiri dan penuh perhitungan, yang sibuk mengejar kepentingan dirinya sendiri. Esai Coleman tentang modal sosial dan modal manusia, hubungan dipandang membangun sumber modal dengan membantu menciptakan kewajiban dan harapan antaraktor, membangun kejujuran lingkungan sosial, membuka saluran informasi dan menetapkan norma yang menopang bentuk-bentuk perilaku tertentu sambil menerapkan sanksi pada calon-

calon penunggang bebas (Coleman, 1988-9: 102-4). Ciptannya di fasilitasi oleh kedekatan antara jaringan aktor yang berbeda, oleh stabilitas dan oleh ideologi umum bersama (Coleman, 1994: 104-8, 318-20).

Coleman menganggap kedekatan yaitu adanya hubungan yang memberikan manfaat timbal balik antar aktor dan institusi berbeda sebagai suatu yang esensial dalam memberikan tidak hanya dipenuhinya kewajiban, namun juga bagi dijalankannya sanksi. Satu contoh, berarti bahwa jemaat, kampung dan kerabat bertindak untuk mendorong guru dan orang tua melarang anak muda untuk bolos atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Modal sosial di luar keluarga menurutnya ada di dalam kepentingan, bahkan gangguan, dari seorang dewasa dalam aktifitas anak-anak orang lain (Coleman, 1990: 334).

2. Menurut Robert Lawang, modal sosial menunjuk pada semua kekuatan-kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya (Lawang, 2004:24). Konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, setiap individu dapat bekerjasama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya serta

meminimalisasikan kesulitan yang besar. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah. Hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut (Ibrahim, 2006:110).

#### **2.1.5 Modal Sosial Dapat Menciptakan Nilai Ekonomi**

Kata “sosial” dalam frasa “modal sosial” bermakna sebagai sebuah relasi antar manusia, bukan dalam makna non ekonomi sebagaimana pada istilah “yayasan sosial” atau “bantuan sosial”. Dengan kata lain, modal sosial sesungguhnya adalah modal yang digunakan dalam aktifitas ekonomi, sebagaimana modal financial dan sumber daya alam.

Secara teoritik komodifikasi menjelaskan cara kapitalis dalam menjaga tujuan untuk mengakumulasi capital atau merealisasi nilai melalui transformasi nilai guna kepada nilai tukar. Komodifikasi telah mengubah objek, kualitas dan tanda-tanda menjadi komoditas dimana komoditas merupakan item yang dapat diperjualbelikan di pasar. Komodifikasi seringkali diikuti dengan



membedakan kadangkala dan manipulasi komoditas kebudayaan otentik kmasyarakat (Marx, 1977: 120).

Perspektif kritis ekonomi, modal sosial menjadi wadah praktek komodifikasi yang mana elemen modal sosial di manfaatkan menjadi nilai tukar yang nantinya akan dijadikan ukuran bahwa komodifikasi itu akan berjalan di dalam masyarakat.

Penelitian Barata (2004) di Yogyakarta menemukan bahwa modal sosial berupa jaringan sekampung halaman telah membuka jalan untuk jaringan sosial yang ada dan bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersiat informal, ketika bantuan formal dari pemerintah sangat terbatas. Modal sosial yang mereka miliki telah menciptakan nilai ekonomi bagi dirinya. Keadaan ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Bastelaers (2000), bahwa anggota masyarakat yang paling miskin yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, menjadikan jaringan-jaringan sosial sebagai elemen penting untuk memenhi pemodalannya.

Modal sosial juga mampu mengembangkan kemitraan, sebagai salah satu bentuk relasi yang diedealkan dalam kegiatan ekonomi. Penelitian Kolopaking (2002) mendapatkan bahwa modal sosial berperan mulai dari kegiatan tahap awal dalam kegiatan di tingkat komunitas, dilanjutkan dengan memproduksi usaha kecil dan gurem dan komunitas ke organisasi desa, dan akhirnya menjadi unsure pengelolaan kolaborasi serta memelihara jejaring

kolaborasi. Meskipun proses ini berhasil karena ada pihak luar sebagai fasilitator, namun keberadaan modal sosial dalam masyarakat sangat berperan dalam membentuk kesamaan opini di antara *stakeholders*.

Jejaring menjadi sarana untuk membentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan prinsip kesetaraan, informal, dan partisipasi dalam membangun komitmen, maka masalah-masalah kemitraan usaha berbasis komunitas dapat ditangani secara sinergis. Dengan demikian pilar utama mensinergikan antara pengembangan kemitraan usaha kecil atau gurem dengan kawasan ekonomi adalah dengan membentuk usaha masyarakat berbasis komunitas. Implikasinya adalah bahwa dari pengembangan kolaborasi tersebut, pengelolaan kemitraan memerlukan muatan solidaritas moral semua pihak yang merupakan indikator dari modal sosial yang tumbuh dalam diri mereka (Syahyuti, 2008:36)

#### **2.1.6 Pariwisata**

Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 1998: 23). Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000: 2).

Destinasi pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut dikaitkan dengan Rencana naskah Akademik Undang-Undang Kepariwisata (2006), maka yang dimaksud dengan destinasi pariwisata adalah suatu tempat atau wilayah yang tidak selalu identik dengan wilayah administratif, tetapi lebih mengarah pada konstruksi mental, bersifat dinamik, sesuai dengan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan yang membentuk tempat tersebut dan terbentuk karena karakteristik spasial, temporal dan sosiokultural, serta memiliki nama dan makna sehingga memiliki citra tertentu. Di dalamnya tercantum komponen-komponen produk pariwisata, antara lain daya tarik, pelayanan dan sumber daya wisata lainnya (Dewa Putu. 2013: 21).

Myra P Gunawan (2000), jika destinasi pariwisata di kategorikan sebagai sebuah sistem maka akan terdapat tiga karakter yang paling penting sebagai berikut.

1. Hierarki, ada destinasi utama dan ada dan ada destinasi penunjang, ada yang besar dan ada yang kecil skalanya, tidak semua destinasi (lokal) mempunyai posisi yang sama.
2. Struktur, misalnya ada pintu gerbang (Internasional atau Regional), ada *staging area*, dan ada *touristic areadengan* daya tariknya: dilihat dari sisi lain, ada kota besar, kota kecil, pedesaan atau kawasan wisata yang mengalami urbanisasi.
3. Jejaring, hubungan berkaitan antara destinasi dengan 'origin', tempat asal wisatawan, dan jejaring hubungan antar destinasi. Hubungan ini

dapat diartikan sebagai hubungan fisik (prasarana penghubung) dan jejaring nonfisik.

kegiatan pariwisata terdiri dari tiga unsur, diantaranya:

1. Manusia merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan maksud menikmati keindahan dari suatu tempat (alam)
2. Ruang (space) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan.
3. Waktu (time) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata (Munasef (1995) dalam Sulaksmi (2007).

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pengembangan pariwisata adalah agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka kunjungi sehingga dapat menambahkan devisa untuk Negara bagi wisatawan asing, dan menambahkan pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal. Disamping itu juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut. Sehingga, keuntungan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh penduduk sekitar khususnya.

Pariwisata dalam perkembangannya tergantung pada produksi industry pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan

perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Negara yang sadar akan pengembangan pariwisata berdasarkan Direktorat Jendral Pariwisata bisa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Oka 1997: 52):

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga seluruh bagi pengembangan pariwisata di perhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor lain.
2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semasa ekonomi, fisik dan sosial sesuatu negara.
3. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
4. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam sesuatu negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu
5. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
6. Penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masak sesuai kemampu
7. Pencatatan (monitoring) secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan sehingga

merupakan bahan yang baik untuk meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah

#### **2.1.7 Obyek Wisata**

Suwantoro(2004: 23) menjelaskan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan:

- a) Obyek wisata dan daya tarik wisata alam Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.
- b) Obyek wisata dan daya tarik budaya Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.
- c) Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.

#### **2.1.8 Wisata Syariah**

Wisata Syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah SWT, selama dalam perjalanan dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah makan dan minum yang halal thayyibah hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Wisata syariah

didefinisikan sebagai upaya perjalanan untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah SWT (Tohir Bawazir, 2013: 22).

Konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Tourism Review, 2013). Konsep wisata Syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015). Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya (Kamarudin, 2013: 74).

Fundamental dari wisata Syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga

fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel Syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep Syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata Syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Satu hal yang harus dipahami bahwasannya wisata Syariah ini tidak harus merupakan wisata religi yang umum berlaku saat ini (Kovjanic, 2014).

#### **2.1.9 Dasar agama tentang wisata**

Wisata dalam islam adalah sebuah safar atau traveling untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam untuk menguatkan keimanan dan motivasi diri untuk terus menunaikan kewajiban hidup. Intinya wisata syariah harus dipahami sebagai konsep keagamaan dan kebudayaan, dimana tujuan-tujuan islami, ajaran-ajaran islam serta kaidah dan akidah islamiyah harus dimasukkan dan dijadikan program-program yang ditawarkan dalam aktifitas wisata syariah tersebut.



Artinya wisata syariah tidak sekedar untuk memindahkan aktivitas para turis ke area kita, melainkan juga kita bisa menawarkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan kita pada mereka (Hery Sucipto & Fitria Andayani. 2012: 61).

#### **2.1.10 Etika Agama Terhadap kepariwisataan**

Pariwisata yang memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Di dalam muamalah, pandangan agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa disandarkan kepada makna kaidah yang disebut *maqashid al-syari'ah*. Oleh Ibn al-Qaiyim al-Jauziah (1997:14) syariat itu senantiasa di dasarkan kepada *maqashid syari'* dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan yang sesungguhnya. Bahwasannya itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Sebangun dengan itu, mengambil yang terbaik daripada yang baik harus pula diutamakan. Di dalam kaitan ini maka bila dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan agama niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini belaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).

Pandangan agama akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak. Wisata yang menyimpang pasti bertentangan dengan agama. Terhadap hal ini, agama apa pun mengharamkannya. Lebih dari itu, pariwisata dapat pula menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi.

Pertunjukan yang disajikan nantinya oleh seniman atau pelaku seni pada dunia wisata ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

Kedua, nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti da'i atau mubbaligh dan muballighat, jama'ah pengajian, majelis ta'lim dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum, fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapian, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Ketiga, para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan

perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

Keempat, objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, gallery dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.

Kelima, fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks perhotelan, amatlah penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya (Shofwan Karim, 2003:6-8).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama diangkat oleh (Andriani, 2015: 163) mengenai “kajian Pengembangan Wisata Syariah”. Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan objek wisata syariah berdasarkan survey yang telah dilakukan diketahui daya tarik, akomodasi dan aksesibilitas merupakan sebuah syarat apabila hendak ingin mengembangkan sebuah wisata, diketahui pula masih perlu dilakukan pembenahan di berbagai aspek terutama untuk amenities pendukung seperti ketersediaan tempat ibadah dan restoran halal. Terutama di Aceh dan Manado.

Persamaan dengan penelitian ini bahwasannya dapat diketahui sama-sama meneliti perkembangan wisata syariah mulai dari pengertian wisata syariah seperti apa, model dan bentuk serta cara yang paling ampuh dalam mengembangkan wisata syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian terlihat dari bentuk laporan atau pendekatan pada penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif.

Penelitian terdahulu yang kedua diangkat oleh (Murwani, 2013: 46) mengenai “Modal Sosial dan Pembangunan (Studi Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat)”. Dosen Sosiologi Universitas Pattimura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan pembangunan di desa adalah karena adanya modal sosial. Modal sosial yang paling mempengaruhi percepatan pembangunan adalah kepercayaan/trust. Kepercayaan dalam hal ini yang paling penting adalah kepercayaan kepada pemerintah desa. Dengan adanya kepercayaan terhadap pemerintah desa maka pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah digerakkan, begitu pula untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah desa/ negeri dengan pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam tiap perencanaan desa. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa/ negeri memang merupakan kebutuhan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini bahwasannya sama-sama meneliti tentang modal sosial dalam pembangunan tingkat desa atau lokal. Sedangkan perbedaannya terletak dalam kajian pembangunannya, penelitian yang akan dilaksanakan lebih berfokus dalam pengembangan wisata syariah.

Penelitian terdahulu yang ketiga diangkat oleh (Kusumastuti 2015: 80) mengenai “Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur” Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modal sosial yang terikat ini menghasilkan kapasitas adaptasi, antara lain berupa: kerja sama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat,

prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan infrastuktur perdesaan.

Persamaan dari penelitian ini adalah modal sosial yang dikembangkan bahwasannya untuk sebuah pembangunan desa bisa dari infrastruktur dan fasilitas serta dalam pelaksanaan mencakup masyarakat secara keseluruhan.

TABEL 1

PERBANDINGAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Temuan	Hasil Relevansi
1	Andriani, 2015: 163 mengenai “kajian Pengembangan Wisata Syariah”. Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	Pengembangan objek wisata syariah berdasarkan survey yang telah dilakukan diketahui daya tarik, akomodasi dan aksesibilitas merupakan sebuah syarat apabila hendak ingin mengembangkan sebuah wisata, diketahui pula masih perlu dilakukan pembenahan di berbagai aspek terutama untuk amenitas pendukung seperti ketersediaan tempat ibadah dan restoran halal. Terutama di Aceh dan Manado.	Persamaan dengan penelitian ini bahwasannya dapat diketahui sama-sama meneliti perkembangan wisata syariah mulai dari pengertian wisata syariah seperti apa, model dan bentuk serta cara yang paling ampuh dalam mengembangkan wisata syariah.  Sedangkan perbedaan dari penelitian terlihat dari bentuk laporan atau pendekatan pada penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif.
2	Murwani, 2013: 46 mengenai “Modal Sosial dan Pembangunan (Studi Masyarakat Waimital	Keberhasilan pembangunan di desa adalah karena adanya modal sosial. Modal sosial yang paling mempengaruhi percepatan	Persamaan dalam penelitian ini bahwasannya sama-sama meneliti tentang modal sosial dalam

	<p>Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat)”. Dosen Sosiologi Universitas Pattimura</p>	<p>pembangunan adalah kepercayaan / trust. Kepercayaan dalam hal ini yang paling penting adalah kepercayaan kepada pemerintah desa. Dengan adanya kepercayaan terhadap pemerintah desa maka pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah digerakkan, begitu pula untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah desa/ negeri dengan pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam tiap perencanaan desa. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa/ negeri memang merupakan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>pembangunan tingkat desa atau lokal. Sedangkan perbedaannya terletak dalam kajian pembangunannya, penelitian yang akan dilaksanakan lebih berfokus dalam pengembangan wisata syariah.</p>
3	<p>Kusumastuti 2015: 80 mengenai “Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur” Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya.</p>	<p>Modal sosial yang terikat ini menghasilkan kapasitas adaptasi, antara lain berupa: kerja sama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan infratsruktur perdesaan.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah modal sosial yang dikembangkan bahwasannya untuk sebuah pembangunan desa bisa dari infrastruktur dan fasilitas serta dalam pelaksanaan mencakup masyarakat secara keseluruhan.</p>

## **2.3 Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan teori modal sosial terutama dalam pandangan Robert D. Putnam. Sebagai pisau analisis fenomena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adanya sebuah modal sosial dalam suatu masyarakat pastilah harus diterapkan karena apa dengan adanya modal sosial dapat menciptakan sebuah perubahan dan pengembangan suatu daerah. Serta nanti juga akan menambahkan perspektif kritis terkait dengan teori komodifikasi sebagai penunjang pengembangan objek wisata syariah.

Penjabaran modal sosial adalah penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama (Putnam dalam Suharto, 2007). Elemen umum yang mendasari setiap tipe modal sosial adalah keterlekatan. Tindakan individual dan kolektif yang dilakukan merupakan sumber daya yang dapat mempengaruhi hubungan antar tingkat struktur sosial (Prendergast, 2005: 715).

### **2.3.1 Konsep-Konsep Utama Dalam Modal Sosial**

Beberapa definisi yang diberikan para ahli tentang modal sosial yang secara garis besar menunjukkan bahwa modal sosial merupakan unsur pelumas yang sangat menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok atau terbangunnya suatu perilaku kerjasama kolektif. Dalam modal sosial selalu tidak terlepas pada tiga elemen pokok yang ada pada modal sosial yang mencakup, Kepercayaan/Trust (kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati), Jaringan Sosial/Social Networks (partisipasi,



resiprositas, solidaritas, kerjasama), Norma/norms (nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, aturan-aturan). Menurut ketiga elemen modal sosial di atas berikut aspek-aspeknya pada hakikatnya adalah elemen-elemen yang ada atau seharusnya ada dalam kehidupan sebuah kelompok sosial, apakah kelompok itu bernama komunitas, masyarakat, suku bangsa, atau kategori lainnya atau dengan kata lain elemen-elemen modal sosial tersebut merupakan pelumas yang melicinkan berputarnya mesin struktur sosial.

#### 1) Jaringan Sosial (Social Network)

Hubungan manusia sangat berarti baginya sebagai individu. Dapat dikatakan bahwa kita, setidaknya sebagian, diartikan melalui siapa yang kita kenal. Secara lebih luas, ikatan-ikatan di antara manusia juga berperan sebagai dinding pembatas bagi struktur-struktur sosial yang lebih luas. Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset yang bernilai (Field, 2005:16) jaringan-jaringan menyediakan suatu basis bagi kohesi sosial karena menyanggupkan orang untuk bekerjasama satu sama lain dan bukan hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung agar saling menguntungkan. Jaringan lebih mobil dari pada hirarki. Dalam alokasi sumber daya ala jaringan, transaksi terjadi tidak melalui pertukaran yang terpisah atau restu administratif, tetapi melalui jaringan-jaringan individu yang terlibat dalam aksiaksi timbal balik, saling mengutamakan, dan saling mendukung.

Jaringan dapat bersifat kompleks; mereka tidak menerapkan kriteria pasar yang eksplisit, juga tidak memakai paternalisme yang biasanya terdapat dalam hirarki. Sebuah asumsi dasar dari hubungan

jaringan adalah bahwa satu pihak tergantung pada sumber-sumber yang dikontrol oleh pihak lain, dan bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh dari penggabungan sumber daya. Intinya, pihak-pihak dalam jaringan setuju untuk tidak mengejar kepentingan diri sendiri dengan jalan merugikan yang lainnya. Powell (dalam Hamilton, 1996:270)

## 2) Trust (saling percaya)

Trust atau saling percaya merupakan komponen penting dari adanya masyarakat. Masyarakat yang pada anggotanya tidak saling percaya, maka akan hancur. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub-komponen dari *trust* adalah menghargai dan saling jujur. Maka, dari hal ini, ada larangan berbohong, larangan menghina, merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Apabila para anggota masyarakat atau organisasi social sudah saling menghargai dan saling jujur, maka pasti akan muncul *trust* atau saling percaya.

## 3) Norm (tatanan/pranata sosial yang berlaku)

Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata nilai dalam bertindak. Maka, dalam fungsi ini, bagi masyarakat, norma memberikan:

- a. Merupakan pedoman berperilaku bagi antar individu dan apa yang mesti mereka lakukan.

- b. Merupakan alat penjaga keutuhan eksistensi masyarakat tertentu. Suatu masyarakat akan disebut eksistensinya jika mereka memiliki norma yang berlaku dan disepakati bersama, apabila tidak ada maka tidak ada masyarakat melainkan hanya sekumpulan benda.
- c. Merupakan alat bagi sesama anggota dalam melakukan kontrol sosial.

Output dari semua piranti modal sosial adalah untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, kelompok maupun organisasi sosial. Manusia adalah makhluk yang bertujuan, semua tindakannya, baik pribadi maupun kolektif adalah untuk alasan tertentu. Maka, dalam konteks kemasyarakatan, pasti ada tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh mereka. Seperangkat tujuan bersama itulah yang merupakan sebab kenapa masyarakat mesti saling percaya (building trust), meski membuat aturan yang disepakati bersama (norms), dan membuat skema jejaring sosial (social network) yang biasanya berwujud informal, serta reciprocity ada hubungan timbal-balik (Haryanto 2011: 173).

Konsep modal sosial saat ini terkenal berkat usaha Putnam mendedikasikan persoalan itu dalam karyanya yang berjudul *Bowling Alone* (2000). Putnam menjabarkan modal sosial sebagai seperangkat asosiasi antar manusia yang bersifat horizontal yang mencakup horizontal yang mencakup jaringan dan norma bersama yang berpengaruh terhadap produktifitas suatu masyarakat. Intinya Putnam melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial, dan kepercayaan (trust) (Putnam 1995). Jaringan sosial dan norma-norma mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan produktivitas suatu komunitas

yang menjadi fokus pembentukan dan pemeliharaan modal sosial. Perspektif Putnam tentang modal sosial fokus pada tingkat keluarga dan komunitas serta menekankan pentingnya hubungan antar individu yang kuat disertai dengan tingkat responsibilitas yang tinggi. Bagi Putnam modal sosial merupakan indikator kunci lemahnya keterlibatan sosial (civic engagement). Putnam mendefinisikan bahwa ekspansi teknologi komunitas merupakan penyebab beberapa kecenderungan makro, seperti tingkat pendidikan, perubahan struktur keluarga dan berbagai bentuk diferensiasi sosial lainnya (Osgood dan Ong, 2001; 207-208).

Putnam menyadari modal sosial sebagai sumber daya dan kemungkinan-kemungkinan positif. Ia membedakan antara modal sosial eksklusif (bonding) dan modal sosial inklusif (bridging).

- a. Jenis modal sosial bonding, terjadi pada masyarakat yang homogeny, sering bersifat parokhial, dan hanya memiliki akses dari lingkungan internal. Ketika diterapkan sebagai tindakan sumber daya efektif untuk kelompok-kelompok khusus, seperti kelompok etnik minoritas yang menciptakan kegiatan ekonomi, keuntungannya menjadi terbatas. Faktor terpenting bagi peningkatan pembangunan suatu masyarakat adalah kuat lemahnya ikatan kepercayaan dan solidaritas yang tercermin dari para enterprenuer yang mampu mencapai potensinya yang penuh (Leonard, 2004:919-920).

Dalam bukunya *Bowling Alone*, Putnam menyatakan bahwa jaringan sosial menghasilkan saluran-saluran melalui mana seseorang dapat merekrut orang lain untuk memproduksi barang dan jaringan sosial membentuk norma-norma resiprositas yang mengatur kesejahteraan yang

diperoleh seseorang. Dalam suatu komunitas dengan tingkat jaringan sosial yang kuat, akan lebih mudah terbentuk rasa memiliki dan kohesi sosial.

- b. Jenis modal sosial bridging, merepresentasikan diversitas hubungan-hubungan sosial dalam suatu komunitas. Komunitas yang memiliki pertemanan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial beragam diharapkan mempunyai tingkat kolaborativitas dan memiliki kontribusi yang lebih tinggi bagi terbentuknya keinginan kolektif. Jaringan sosial informal menunjuk pada interaksi-interaksi antar keluarga, teman dan lain-lain. Tipe-tipe interaksi seperti ini *meningkatkan a sense reciprocity* dan saling kepedulian di antara sesama.

Menurut beberapa ahli ilmuwan berdasarkan Pescosolido (2005:216), beberapa pendapat tentang pendekatan modal sosial tidak membawa ide menarik terhadap perspektif jaringan. Apa yang ditawarkan hanyalah “baju konseptual yang lebih menarik”. Terdapat tiga aspek unik pendekatan ini perlu dicatat.

- a. Lebih dari sekedar tradisi yang lain, penelitian modal sosial dipopulerkan untuk mendiskripsikan kondisi masyarakat sipil. Konsep Bowling Alone (Putnam) dan perbedaan area geografis (Rahn) berhubungan dengan isu kebijakan publik. Sebagai contoh, Wilson berpendapat bahwa jaringan sosial membentuk modal sosial yang selanjutnya keduanya mempunyai kontribusi bagi keterlibatan masyarakat.

Sumber daya ini diukur pada tingkat ganda (individu, tetangga, dan bangsa) dan tugas pengukuran lebih sulit dibandingkan tradisi yang lain. Data modal sosial dikumpulkan dalam suatu cara yang bervariasi, mulai dari sejumlah jaringan positif atau hubungan antar individu memiliki karakteristik geografis secara keseluruhan.

- b. Modal sosial fokus perhatiannya pada kualitas positif (bukan pada konsekuensi-konsekuensi penting) dari ikatan sosial. dari perspektif jaringan sosial, aspek ini mungkin paling bermasalah seperti tradisi pendukung sosial, penekanan pada konten positif.
- c. Pendekatan modal sosial memperluas perspektif jaringan yang menarik bagi ilmu-ilmu sosial di luar disiplin ilmu sosiologi. Melalui sosiabilitas yang paralel dengan “modal sosial” dan “modal fiksial”, pengalaman modal sosial memperkuat tesis sosiologi bahwa interaksi sosial mempunyai efek kuat (powerfull) terhadap aktor.

## 2.4 Alur Berfikir dan Konsep Penelitian

Alur berfikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Hal ini diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur pikir tersebut digunakan untuk memberi konsep di lapangan. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui implementasi modal sosial dalam pengembangan objek wisata syariah. Pada dasarnya kebutuhan akan pariwisata yang berbasis islam yang kini mulai di lirik oleh wisatawan. Banyak sekali objek wisata saat ini hadir di tengah-tengah kita seakan sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Objek wisata saat ini harus memiliki ciri tertentu untuk menarik perhatian luar contohnya dengan menggalakkan wisata islami yang tidak banyak kita jumpai. Diharapkan nantinya mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada alur pikir kali ini peneliti akan menentukan poin-poin mana saja yang akan dibahas berawal dari masyarakat dan pemerintah sebagai fokus utama yang nantinya akan di jelaskan lebih fokus lagi. Modal sosial menurut Putnam terdapat tiga elemen yaitu jaringan, kepercayaan dan norma.

Peran modal sosial menghasilkan pengelolaan wisata syariah yang pada dasarnya milik masyarakat, aspek tersebut adalah: 1) Sumber Daya Manusia, 2) aspek keuangan, 3) aspek material, 4) pengelolaan dan 5) aspek pasar. Diharapkan nantinya dengan adanya beberapa model aspek ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

## Bagan 1

### Alur Pola Pemikiran

